

PROFIL KINERJA AGRIBISNIS SAPI POTONG DI INDONESIA

(Sebuah Review)

Oleh Suharyanto



Program Studi Produksi Ternak
Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu
Agustus 2006

Pendahuluan

Sektor pertanian saat ini sedang mendapat semangat baru melalui gerakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini adalah untuk membangkitkan kembali sektor-sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang setelah beberapa tahun belakangan ini dianggap mengalami kemerosotan. Beberapa indikator menunjukkan adanya kemerosotan peranan sektor ini seperti menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional secara relatif. Dalam bidang pendidikan penyelenggara ilmu-ilmu pertanian juga mengalami penurunan jumlah peminatnya di tingkat nasional.

Kebijakan RPPK ini juga memiliki nilai strategis bila dihadapkan dengan kondisi global saat ini, terutama pasar bebas. Berlakunya pasar bebas di satu sisi merupakan ancaman dan di sisi lain adalah peluang yang cukup menggembirakan bagi dunia usaha di Indonesia. Pasar bebas akan menjadi ancaman manakala secara internal sektor-sektor yang terkait tidak menunjukkan kinerja yang memadai untuk bersaing. Tetapi akan menjadi peluang bila sektor-sektor terkait telah memiliki kesiapan untuk berkompetisi di dalam pasar bebas.

Salah satu sektor yang dianggap masih membutuhkan pembinaan dan pengembangan dalam rangka menghadapi pasar bebas ini adalah sektor pertanian, termasuk di dalamnya adalah subsektor peternakan. Meskipun secara relatif sektor pertanian mengalami penurunan dalam berkontribusi terhadap PDB, secara absolut sektor ini sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi subsektor peternakan terhadap pendapatan sektor pertanian baik secara relatif maupun absolut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Yusdja dan Ilham, 2004). Oleh

karenanya subsektor peternakan memiliki arti penting dalam pembangunan pertanian secara umum.

Pentingnya subsektor peternakan ini selaras dengan meningkatnya konsumsi daging masyarakat Indonesia dan dunia. Secara hipotetis dapat dinyatakan bahwa konsumsi produk-produk peternakan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Delgado *et al* (1999) menyebutkan bahwa di negara-negara dunia ketiga sedang mengalami peningkatan konsumsi produk peternakan yang cukup signifikan yang mana ini selaras dengan tingkat pertumbuhan penduduknya dan kesejahteraannya yang juga meningkat. Menurut Yusdja dan Ilham (2004) bahwa peningkatan konsumsi produk-produk peternakan juga berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan dimana semakin sejahtera maka semakin meningkat konsumsi produk peternakannya hingga didapati suatu kondisi yang seimbang sebagaimana yang telah dicapai oleh negara-negara maju. Sayangnya meningkatnya konsumsi ini tidak dibarengi dengan produktivitas subsektor ini secara memadai.

Tingkat konsumsi daging masyarakat Indonesia sampai saat ini masih berada di bawah Pola Pangan Harapan. Rata-rata konsumsi daging masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 7,66 kg/kapita/tahun pada periode tahun 1992 – 1996 dan turun menjadi 5,33 kg/kapita/tahun pada periode tahun 1998 – 2001 (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2001). Menurut Soedjana (1997) bahwa Pola Pangan Harapan adalah sebesar 10,1 kg/kapita/tahun. Selanjutnya menurut data Ditjen Bina Produksi Peternakan (2004) tanpa mengkonversi dalam kg/kapita bahwa konsumsi daging sapi dalam satuan ekor untuk tahun 2000 sampai 2004 cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 1.247.733, 1.200.019, 1.292.542, 1.368.185, dan 1.355.438 ekor.

Untuk meningkatkan konsumsi daging dan memenuhi kebutuhan daging melalui sapi lokal, pemerintah mengeluarkan program swasembada daging 2010. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan “program mendesak kecukupan daging 2005”. Komoditas yang menjadi unggulan adalah sapi potong karena dianggap memiliki nilai strategis. Yang dimaksudkan dengan kecukupan (swasembada) daging sapi menurut Ditjen Bina Produksi Peternakan adalah tersedianya pangan hewani asal ternak sapi sampai pada tingkat rumah tangga dengan harga terjangkau, aman, sehat, utuh dan halal. Paling tidak 90% dari jumlah daging sapi yang dikonsumsi berasal dari produksi dalam negeri (tidak termasuk daging yang berasal dari sapi bakalan impor) (Anonim, 2004).

Sayangnya, profil agribisnis peternakan Indonesia di semua komoditas dan segmen agribisnis menunjukkan gambaran yang kurang menggembirakan. Oleh

karenanya untuk mengetahui bagaimana akan terpenuhinya swasembada daging maka ada baiknya kita meninjau kinerja agribisnis sapi potong sebagai salah satu bahan kajian untuk beberapa tahun terakhir. Dengan mengetahui kinerja agribisnis sapi potong selama ini maka diharapkan akan memberikan suatu gambaran dan jalan pemecahan permasalahan untuk menunjang program swasembada daging 2010.

Rumah Tangga Petani dan Peternakan Rakyat

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003 (BPS, 2004) terdapat 52,6 juta Rumah Tangga (RT) dimana terdapat 25,6 juta RT pertanian. Jumlah RT pertanian ini secara absolut meningkat dari 20,8 juta pada tahun 1993 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,10% pertahun. Namun demikian secara persentase terdapat penurunan yaitu dari sebesar 50,45% RT pertanian terhadap total RT pada tahun 1993 menjadi 48,66% pada tahun 2003. Akan tetapi, dari 25,6 juta RT pertanian terdapat 24,4 juta RT pengguna lahan dan ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,7% dari tahun 1993. RT pengguna lahan masih didominasi pengguna lahan untuk kegiatan pertanian padi/palawija, yaitu sebanyak 18,1 juta RT. Selanjutnya diikuti oleh pengguna lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura sebanyak 9,3 juta, perkebunan 7,7 juta, budidaya tanaman kehutanan 3,7 juta, peternakan 6,5 juta, kolam air tawar/sawah 0,8 juta dan tambak/air payau sebanyak 0,15 juta RT.

Masih menurut BPS (2004) bahwa tahun 2003 terdapat 13,7 juta petani gurem yang juga meningkat 2,4% pertahun sejak 1993, dimana terdapat 52,1% pada tahun 1993 menjadi 56,2% tahun 2003.. Petani gurem ini kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, yaitu terdapat 25,14% petani gurem terdapat di Jawa Timur, 22,98 di Jawa Tengah, 18,84% di Jawa Barat, dan 3,15% di Provinsi Banten. Sementara di daerah-daerah lain jumlah petani guremnya relatif kecil, yaitu kurang dari 3 % dari total petani gurem se-Indonesia, kecuali Sumatera Utara, yaitu 4,1%. Meningkatnya petani gurem di pulau Jawa diduga karena adanya sistem pewarisan tanah yang berbagi dan konversi lahanproduktif menjadi areal non pertanian.

Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat Indonesia. Dari sebanyak 52,6 juta RT hanya 6,5 juta yang menyelenggarakan kegiatan utama peternakan. Kecilnya aktivitas RT utama bidang peternakan ini bukan berarti pada jenis usaha pertanian lain tidak terdapat usaha peternakan, justru bisanya ternak yang dipelihara terintegrasi dengan sistem usahatani lainnya. Hal ini mendorong untuk dilakukannya terobosan baru untuk

meningkatkan aktivitas yang melibatkan peternakan sebagai usaha keluarga dan masyarakat serta swasta ataupun pemerintah dalam sistem yang terintegratif sehingga secara kumulatif dapat meningkatkan total pendapatan usahatani keseluruhan dengan tanpa lahan baru.

Saat ini usaha peternakan untuk menghasilkan sapi bakalan (*cow calf operation*) dalam negeri 99 persen dilakukan oleh peternakan rakyat yang sebagian besarnya berskala kecil dengan tingkat kepemilikan 1 – 5 ekor per KK. Usaha ini biasanya terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehingga fungsi sapi sangat kompleks (Anonim, 2005). Oleh karenanya pembuatan kebijakan dalam pembangunan peternakan tidaklah terlepas dari kondisi objektif bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak memilah-milah secara jelas antara peternakan dan pertanian umumnya. Hal ini dikarenakan sistem usahatani yang masih bersifat subsisten yang banyak oleh petani gurem.

Banyaknya peternakan rakyat yang berperan dalam menghasilkan sapi bakalan ini mendorong perlunya pengembangan peternakan berbasis kerakyatan. Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa kepemilikan ternak yang relatif kecil tersebut secara ekonomis kurang menguntungkan sementara petani tidak secara khusus melakukan kegiatan usaha peternakan. Ini, tentu saja, memerlukan upaya bagaimana meningkatkan usaha peternakan dengan tetap terintegrasi dengan sistem usahatani yang tengah dilangsungkannya.

Kebijakan dan Program Pemerintah

Adanya reorientasi kebijakan pembangunan pertanian, maka pembangunan peternakan harus menggunakan paradigma baru yang sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan pertanian. Salah satu program yang merupakan penjabaran dari “paradigma baru” tersebut adalah “Program mendesak kecukupan (swasembada) daging 2005”. Program ini telah dimulai pada tahun 2000 dimana kebijakan dan langkah-langkah operasionalnya telah diupayakan melalui berbagai proyek dan kegiatan (Anonim, 2004).

Sasaran yang ingin dicapai dari program mendesak kecukupan (swasembada) daging 2005 dari tahun 2000 – 2005 adalah (a) makin tingginya tingkat kelahiran dari 18,5% menjadi 20,9% dan menurunnya tingkat kematian dari 4,0% menjadi 3,0%; dan (b) meningkatnya laju pertumbuhan populasi ternak dari 0,66% menjadi 1,05%. Dengan laju peningkatan tersebut maka selama 2000 – 2005 diharapkan akan terjadi peningkatan penawaran daging sapi dalam negeri dari 82,0% menjadi 93,0%, yaitu dari 307 ribu ton

menjadi 464 ribu ton. Sebaliknya akan terjadi penurunan penawaran daging impor sapi bakalan dari 13% menjadi hanya 4,0%, yaitu dari 181 ribu ekor menjadi 74 ribu ekor dan penurunan daging sapi beku asal impor dari 5,0% menjadi 3,0% (Anonim, 2004).

Program kecukupan (swasembada) daging 2005 akan terpenuhi bila dilakukan melalui kegiatan-kegiatan operasional sebagai berikut (Anonim, 2004).

1. Peningkatan populasi ternak sapi potong.
 - a) pengendalian pematangan betina produktif. Ternak sapi betina yang dipotong mencapai 40% dari total sapi yang dipotong dan 70%-nya merupakan betina produktif,
 - b) pengendalian penyakit reproduksi, terutama brucellosis.
 - c) penyediaan bibit sapi unggul, yaitu melalui impor bibit ternak sapi dalam rangka menambah populasi ternak sekaligus meningkatkan mutu genetik keturunannya.
2. Peningkatan produktivitas.
 - a) introduksi teknologi embrio tranfer (ET) dan inseminasi buatan (IB) secara terpadu dan terkonsentrasi yang diikuti dengan program penggemukan.
 - b) pengembangan pakan ternak yang cukup dan bermutu serta tersedia setiap saat,
 - c) pengembangan sentra baru kawasan.
3. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
 - a) memperbaiki kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan ternak ke arah komersial dan privatisasi sehingga dapat menghasilkan bibit ternak sapi berkualitas tinggi. Langkah ini dilakukan dengan mengarah pada terbentuknya *village breeding center*.
 - b) desentralisasi Balai Inseminasi Buatan (BBIB) untuk mendekatkan penyediaan semen beku dengan peternak dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan.

Program-program pemerintah tersebut sepenuhnya diarahkan pada penanggulangan penurunan produktivitas sapi potong dan pengamanan populasi ternak sapi dalam rangka kecukupan daging 2005 yang merupakan program mendesak pemerintah.

Populasi dan Produksi Sapi

Menurut data Ditjen Bina Produksi Peternakan (2003) bahwa laju pertumbuhan populasi ternak sapi selama 30 tahun terakhir hanya sebesar 1,44 persen. Pertumbuhan sebesar tersebut dinilai sangat lambat dan bahkan di beberapa wilayah justru

menunjukkan penurunan. Adapun 5 tahun terakhir, populasi sapi potong di Indonesia adalah sebesar 11.008.017, 10.215.193, 11.297.625, 10.504.128, 10.532.889 ekor masing-masing adalah untuk tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 (<http://www.deptan.go.id>, diakses 12 Agustus 2006). Data inipun menunjukkan tren yang menurun. Dengan demikian maka populasi sapi potong sebenarnya pada kondisi mengkhawatirkan.

Seiring dengan kondisi populasi sapi potong yang cenderung menurun, produksi daging asal sapi potong juga menunjukkan tren yang sama. Berdasarkan data Departemen Pertanian bahwa produksi daging sapi tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 masing-masing adalah 339.940, 338.690, 330.290, 369.710 dan 447.570 ton (<http://www.deptan.go.id>, diakses 12 Agustus 2006). Produksi daging ini mencolok mulai meningkat tahun 2004 dan 2005. Ini mungkin karena adanya peningkatan laju ekstraksi pada tahun-tahun tersebut seiring dengan mulai menurunnya impor daging.

Untuk mengatasi penurunan populasi dan produksi ternak tersebut, pemerintah melakukan program-program operasional (Anonim, 2004). Program-program tersebut dapat diringkas menjadi sebagai berikut

- ❖ pengendalian pematangan betina produktif.
- ❖ pengendalian penyakit reproduksi, terutama brucellosis.
- ❖ penyediaan bibit sapi unggul,
- ❖ introduksi teknologi embrio tranfer (ET) dan inseminasi buatan (IB)
- ❖ pengembangan pakan ternak yang cukup dan bermutu serta tersedia setiap saat,

Program-program tersebut sebenarnya belum begitu menolong pengamanan populasi dan peningkatan produktivitas sapi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa (a) masih terjadinya pematangan ternak betina produktif, (b) pelayanan IB belum optimal dan cenderung mengalami kemunduran serta terjadi penyimpangan-penyimpangan teknis di lapangan yang berpengaruh sangat signifikan, dan (c) adanya penyakit *brucellosis* sehingga mengurangi tingkat kelahiran. Ilham *et al.* (2001) menengarai bahwa hal ini disebabkan oleh (a) program yang dilakukan belum sepenuhnya merata pada peternak, (b) peternak kesulitan dalam menerapkan introduksi teknologinya, (c) pengembangan usaha peternakan masih belum menjadi prioritas pemerintah, (d) intensifikasi pertanian terutama sawah telah mengurangi pemanfaatan ternak sebagai tenaga kerja sehingga banyak petani tidak lagi mengusahakan sapi, (d) masih banyak ternak yang dipelihara secara ekstensif sehingga menyulitkan dalam pengendalian

penyakit dan penurunan mutu genetik karena *inbreeding*, dan (f) menyempitnya lahan penggembalaan.

Namun demikian, lambatnya pertumbuhan populasi ternak sapi ini menurut Yusdja dan Ilham (2004) adalah adanya permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

1. Sentra produksi sapi utama adalah pulau Jawa yang sama sekali tidak mempunyai padang penggembalaan. Ternak dipelihara menyebar sesuai dengan rumah tangga pertanian di seluruh pedesaan dan ternak diberi pakan hijauan pekarangan dan limbah pertanian. Sebagian besar peternak menggunakan teknologi budidaya sangat sederhana dan tujuan utama memelihara ternak sapi sebagai sumber tenaga kerja, tabungan, status sosial dan bukannya sebagai penghasil daging. Pemeliharaan tidak diarahkan pada tujuan pasar.
2. Sentra produksi sapi potong kedua adalah Indonesia kawasan timur dengan porsi populasi sebesar 16% sebagai suplier utama ternak potong bagi DKI Jakarta dan Jawa Barat memang memiliki padang penggembalaan, tetapi padang penggembalaan tersebut dikapling-kapling menurut hak milik dan sering terjadi musim kemarau yang panjang (9 bulan). Padang penggembalaan belum mendapatkan sentuhan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sebenarnya menurut Yusdja dan Ilham (2004) bahwa yang seharusnya menjadi perhatian adalah bukannya melakukan langkah-langkah operasional semacam itu, tetapi pemerintah harus mengupayakan bagaimana supaya produsen mampu memanfaatkan sinyal pasar (baca:konsumen). Atas dasar hal tersebut maka pemerintah di masa mendatang sebaiknya menggunakan sinyal pasar guna mendorong pembangunan dengan menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dan penelitian-penelitian lain yang diperlukan.

Langkah-langkah operasional tersebut sebenarnya secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya bila produsen mampu menggunakan sinyal pasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana produsen dapat menangkap sinyal pasar. Ini adalah kunci dari hipotesis tersebut. Di sinilah letak peran pemerintah untuk melakukan distribusi informasi secara merata, tepat dan akurat dengan disertai fasilitasi pengembangan baik dari segi piranti keras maupun lunak, semisal kebijakan dan peraturan yang menunjang pengembangan usaha sapi potong.

Selain itu, menurut Rahmanto (2004) bahwa upaya peningkatan populasi ternak sapi potong sekaligus untuk menjaga kelestarian betina produktif dari pengurasan maka diperlukan pola pengembangan yang *sustainable*. Yaitu suatu pola dimana diperlukan

penumbuhan peternak-peternak pembibitan (bakalan) dan penggemukan (kereman) pada daerah yang memiliki pola pengusahaan tidak berbasis lahan. Bahkan jika memungkinkan kedua pola ini diintegrasikan supaya meningkatkan nilai tambah bagi peternak.

Pola Pengusahaan Ternak Sapi

Menurut Rahmanto (2004) bahwa untuk memenuhi permintaan konsumsi daging sapi yang terus mengalami peningkatan, maka sejak awal periode 1990-an pemerintah telah melakukan kebijakan pengembangan ternak sapi potong melalui dua pola pengusahaan, yaitu pola pengusahaan yang dilakukan oleh peternakan rakyat dan pola pengusahaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar swasta (*feedlot*). Berkaitan dengan pola pengusahaan *feedlot* ini, pemerintah telah memberikan izin bagi perusahaan swasta untuk melakukan impor ternak untuk digemukkan di dalam negeri dengan tujuan (a) mendorong kemitraan antara perusahaan besar dengan peternakan rakyat melalui pola PIR, (b) menjaga tingkat pertumbuhan populasi ternak sapi domestik dan (c) pemanfaatan lahan-lahan tidur yang tidak subur. Akan tetapi, usaha *feedlot* ini mengalami kebangkrutan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sehingga sampai tahun 2001 sudah tidak ada lagi perusahaan swasta yang menjalin kemitraan dengan peternakan rakyat (Hadi *et al.*, 2002).

Pengembangan usaha ternak sapi rakyat memiliki 2 pola utama, yaitu (a) pola pengembangan sapi potong yang berbasis lahan dan (b) pola pengembangan sapi potong yang tidak berbasis lahan (Rahmanto, 2004). Menurut Rahmanto (2004) bahwa ciri-ciri pengembangan ternak sapi pola pertama adalah (a) pemeliharaan ternak dilakukan di padang penggembalaan yang luas yang tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian sehingga pakan ternak hanya mengandalkan dari rumput di padang penggembalaan tersebut; (b) pola ini biasanya terdapat di wilayah yang tidak subur, sulit air, bertemperatur tinggi dan jarang penduduk seperti NTB dan NTT, sebagian Kalimantan dan Sulawesi; (c) teknik pemeliharaan dilakukan secara tradisional dan kurang mendapat sentuhan teknologi; serta (d) pengusahaan tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sebagai status sosial. Sedangkan pola pengembangan yang kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) pemeliharaan ternak lebih banyak dikandangkan dengan pemberian pakan di dalam kandang; (b) biasanya terkait dengan usahatani sawah dan ladang sebagai sumber hijauan; (c) pola ini biasanya dilakukan di kawasan yang padat penduduk seperti Jawa, Sumatera sebagian Kalimantan, Sulawesi dan NTB; dan (d) pengusahaan pada pola ini

lebih bersifat intensif. Namun demikian jumlah kepemilikan ternak pada pola pertama lebih banyak daripada pola yang kedua.

Menurut Azis (1993) bahwa peternakan sapi potong rakyat memiliki ciri-ciri yaitu skala usaha yang relatif kecil, merupakan usaha rumah tangga, merupakan usaha sampingan, menggunakan teknologi sederhana dan bersifat padat karya. Hadi dan Ilham (2002) menengarai bahwa pada umumnya karakteristik pemeliharaan sapi potong rakyat adalah (a) bertujuan untuk pembibitan dan atau penggemukan, (b) skala usaha sangat kecil, yaitu 1 – 3 ekor, (c) Sistem reproduksi belum efisien, (d) mulai ada pergeseran dari penggunaan bangsa sapi kurang produktif menjadi bangsa yang produktif, dan (e) sistem pemeliharaan pada sistem pertanian intensif, ternak dikandangkan dan pada pertanian ekstensif, ternak dilepaskan di lahan. Oleh karenanya menurut Yusdja dan Ilham (2004) bahwa usaha yang demikian ini memiliki posisi yang sangat lemah dan peka terhadap perubahan. Kondisi pengusahaan ternak yang demikian itu adalah merupakan mayoritas dari peternakan di Indonesia. Saat ini usaha peternakan untuk menghasilkan sapi bakalan (*cow calf operation*) dalam negeri 99 persen dilakukan oleh peternakan rakyat yang sebagian besarnya berskala kecil dengan tingkat kepemilikan 1 – 5 ekor per KK (Anonim, 2005). Oleh karena itu pengembangan yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi permodalan, penciptaan pasar, sistem kelembagaan dan input teknologi supaya usaha rakyat menjadi suatu usaha yang maju (Yusdja dan Ilham, 2004).

Kenyataan bahwa mayoritas pola pengusahaan ternak sapi merupakan usaha peternakan rakyat dengan skala kecil, maka ini merupakan tantangan dan permasalahan tersendiri dalam pengembangan populasi dan produktivitas sapi. Seharusnya, dengan tingginya harga daging sapi domestik akan merangsang tumbuhnya usaha peternakan sapi di dalam negeri. Namun hal ini tidak terjadi pada usaha peternakan sapi rakyat. Peternak rakyat masih saja belum merubah orientasinya memelihara ternak sapi, yaitu sebagai tabungan dan status sosial. Pola pengusahaan yang demikian ini maka sinyal pasar atau konsumen bukan menjadi panduan utama budidaya ternak sapi. Oleh karenanya maka program pengembangan agribisnis sapi hendaknya diarahkan pada usaha yang berorientasi pasar. Untuk itu perlu reorientasi pengembangan peternakan sapi dengan berdasarkan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lokal. Pola pengusahaan yang berbasis lahan semisal di NTT dan NTB perlu mendapat perhatian serius dan intensif. Introduksi teknologi dan manajemen menjadi mutlak diterapkan.

Konversi lahan menjadi lahan-lahan perkebunan juga merupakan “ancaman” bagi usaha peternakan sapi. Namun demikian, hal ini dapat disiasati dengan sistem integrasi.

Sistem integrasi dapat diterapkan bila ada kebijakan yang mengawal program tersebut dan ditemukan pemecahan-pemecahan atas kendala teknis dalam sistem integrasi. Dengan demikian, ke depannya pola pengusahaan ternak sapi bukan hanya yang berbasis lahan non pertanian, tetapi berbasis lahan untuk usaha pertanian lainnya.

Pembibitan Ternak

Salah satu hal mengapa populasi ternak sapi dan produktivitasnya rendah adalah karena rendahnya sistem perbibitan sapi di Indonesia. Sampai saat ini belum ada usaha komersil yang melakukan usaha pembibitan sapi potong baik oleh swasta maupun pemerintah. Hal ini mungkin karena usaha pembibitan sapi potong dianggap kurang menguntungkan karena biaya yang besar untuk perawatan induk, sedangkan nilai jual pedet masih lebih kecil dari biaya perawatan induk. Oleh karenanya usaha pembibitan yang ada hanya dilakukan oleh peternak rakyat yang notabene merupakan usaha sampingan, yaitu di luar kegiatan utama. Oleh karenanya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang serupa.

Justru, usaha penggemukan sapi relatif lebih disukai baik oleh peternak rakyat maupun *feedlotter*. Dengan demikian maka terjadi ketidakseimbangan antara produksi bakalan dengan penggemukannya. Hal ini juga yang menyebabkan semakin terkurasnya populasi sapi domestik.

Usaha pembibitan ternak sapi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Hadi dan Ilham (2002) bahwa beberapa permasalahan dalam usaha pembibitan adalah (a) bahwa di daerah sentra produksi pertanian usaha pembibitan menurun karena berkurangnya permintaan tenaga kerja ternak untuk mengolah tanah sebagai akibat dari makin tingginya intensitas tanam terutama padi, (b) upaya IB masih kekurangan tenaga inseminator, semen bangsa sapi unggul dan fasilitas IB, (c) skala usaha kecil karena tenaga kerja keluarga terbatas, (d) areal padang penggembalaan makin sempit karena terjadi konversi ke penggunaan lain, (e) adanya penyakit reproduksi pada sistem pembibitan ekstensif, (f) Unit Pelaksana teknis (UPT) terkait belum mampu memproduksi dan mendistribusikan ternak dalam jumlah yang memadai dan kurang responsif terhadap meningkatnya minat peternak akan semen sapi unggul jenis tertentu, dan (g) pihak swasta belum ada yang tertarik pada usaha pembibitan karena kurang menguntungkan dibandingkan dengan usaha penggemukan.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada usaha pembibitan sapi rakyat, Hadi dan Ilham (2002) menyarankan (a) perlunya pengaturan

perkawinan melalui teknik IB dengan berbagai alternatif kombinasi bangsa sapi, (b) memberikan pelayanan IB sebaik mungkin kepada peternak melalui peningkatan keterampilan inseminator, dan (c) mengintegrasikan daerah pengembangan pembibitan dengan daerah penggemukan dengan memperhatikan ketersediaan pakan.

Impor Sapi

Kebijakan melakukan impor sapi dilakukan untuk memenuhi permintaan akan daging sapi yang terus meningkat. Pada tahun 1990-an pemerintah telah mendorong dilakukannya impor daging sapi dan ternak sapi bakalan untuk digemukkan di dalam negeri. Hal ini telah mendorong tumbuhnya perusahaan swasta yang bergerak pada penggemukan sapi bakalan impor, terutama dari Australia. Selain itu, Indonesia juga mengimpor jeroan dengan laju pertumbuhan sebesar 74,2% pertahun (Yusdja dan Ilham, 2004).

Nilai impor daging/bakalan sapi cenderung terus meningkat dimana pada tahun 2002 nilai impor daging (termasuk produk olahannya) dan sapi hidup mencapai US\$106.003.410,00 (BPS, 2003). Impor binatang hidup (tidak disebutkan jenis ternaknya) sejak tahun 2002 – 2005 menunjukkan peningkatan. Impor binatang hidup tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 masing-masing adalah 50, 85, 95 dan 94 ribu ton. Sementara impor daging dan olahan dagingnya untuk tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 masing-masing adalah sebesar 71, 45, 64 dan 67 ribu ton (Ditjen Bea Cukai, 2005).

Penggalakan impor sapi bakalan ini karena sulitnya memperoleh sapi bakalan dari dalam negeri dan untuk mencegah terjadinya pengurasan populasi domestik dengan banyak melakukan pematangan betina produktif. Akan tetapi pada tahap perkembangannya, impor daging dan sapi bakalan ini turut mempengaruhi usaha peternakan sapi potong dalam negeri. . Harian Kompas 06 Mei 2005 melaporkan bahwa impor daging dan sapi hidup telah mengganggu sistem pasar lokal sebagaimana yang telah terjadi pada peternak sapi di Jawa Barat yang mengeluhkan akan adanya daging sapi impor karena telah menurunkan penjualannya hingga 50% (Kompas, 06 Mei 2005). Menurut Rahmanto (2004) bahwa kebijakan impor sapi bakalan dan produk turunannya cenderung menunjukkan dampak negatif terhadap harga sapi di tingkat lokal dan volume pengiriman ternak Provinsi Jawa Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa perlu adanya kebijakan valuasi terhadap impor bakalan dan produk turunannya serta memberikan perlindungan dan insentif ekonomi kepada peternak berskala kecil untuk merangsang pengembangan usahanya.

Namun demikian, impor daging dan sapi bakalan tidak bisa tidak dilakukan mengingat stok bakalan dalam negeri tidak mencukupi permintaan akan daging dalam negeri. Rendahnya efisiensi reproduksi dan teknis produksi telah menyebabkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia lambat dibandingkan dengan laju permintaan daging sapi domestik. Hal ini menyebabkan relatif mahal harga sapi di pasaran domestik. Kondisi ini tentunya cukup menyulitkan bagi pemerintah, yaitu antara membela kepentingan produsen domestik atau konsumen. Menurut Saragih (2000) bahwa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah adalah dengan berpihak pada kepentingan agribisnis sapi potong domestik sembari mencegah kenaikan harga daging sapi yang terlalu tinggi dengan cara mengimpor daging sapi dan bakalan secara terkontrol.

Pendekatan Agribisnis dan Kewilayahan

Pendekatan agribisnis dalam sistem usaha pertanian/peternakan harus mencakup empat subsistem yang ada, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran. Suatu usaha yang memenuhi keempat subsistem tersebut dinamakan sebagai berbasis agribisnis. Namun demikian, perlu juga ditambahkan subsistem jasa-jasa penunjang. Hal ini penting sebagai upaya memberdayakan rakyat dalam usaha peternakan sapi potong dengan pendekatan agribisnis mengingat mayoritas pelaku usaha peternakan adalah peternakan rakyat. Konsep ini berarti bahwa dalam usaha peternakan hendaknya berorientasi pada pasar, bukan hanya pada produksi saja.

Pola usaha peternakan yang ada hingga saat ini masih belum berorientasi pasar. Dengan karakteristik usaha peternakan rakyat sebagaimana dikemukakan di atas maka perlu adanya perubahan cara pandang bagaimana melakukan integrasi vertikal terhadap subsistem-subsistem dalam konsep agribisnis tersebut. Dalam melakukan integrasi vertikal ini maka sangat terkait dengan industrialisasi peternakan. Yang demikian ini maka agroindustri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep agribisnis. Menurut Yusdja dan Ilham (2004) bahwa agroindustri itu sendiri merupakan satu subsistem dalam agribisnis yaitu pengolahan baik yang ada di hulu maupun yang ada di hilir. Dengan demikian maka konsep pendekatan agribisnis meliputi juga pendekatan agroindustri.

Sayangnya, pendekatan agribisnis ini belum diimbangi dengan struktur Departemen Pertanian dimana masih belum berwatak “agribisnis” (Yusdja dan Ilham, 2004). Hal ini terlihat dari masih adanya pengkotak-kotakan departemen berdasarkan

komoditas yang masing-masingnya hanya berkuat pada aspek budidaya saja. Sementara aspek lainnya dikerjakan oleh departemen yang lain. Oleh karenanya, di masa mendatang perlu ada perubahan “watak” Departemen Pertanian yang tidak lagi hanya memikirkan aspek budidaya saja melainkan mencakup semua subsistem agribisnis.

Dalam melakukan pendekatan agribisnis peternakan sapi potong perlu juga diperhatikan pada pendekatan kewilayahan. Menurut Yusdja dan Ilham bahwa pendekatan total kewilayahan harus sudah ditinggalkan karena (a) tidak mungkin ternak sapi dikembangkan pada semua wilayah, karena keterbatasan sumberdaya lahan dan manusia; (b) tidak semua wilayah secara ekonomis layak dikembangkan untuk usaha sapi potong; (c) alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas dan harus dialokasikan ke semua provinsi.

Berdasarkan hal tersebut maka mulai saat ini pemerintah sudah bisa memetakan berdasarkan kewilayahan dan daya dukung sumberdaya (lahan, pakan, manusia) untuk melakukan usaha pengembangan agribisnis sapi potong.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan swasembada daging dengan program mendesaknya tahun 2005 berupa terpenuhinya daging hingga tingkat rumah tangga. Program mendesak ini belum mampu terwujud bahkan cenderung gagal dengan adanya indikasi impor sapi bakalan dan produk turunannya yang juga cenderung meningkat seiring dengan tidak mampunya produksi domestik untuk memenuhi permintaan akan daging sapi.
2. Strategi dan langkah-langkah operasional yang ditempuh oleh pemerintah ternyata belum mampu menunjukkan hasil yang memadai untuk mengamankan populasi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Pendekatan yang telah ditempuh banyak menemui kendala teknis dan non teknis serta penyimpangan-penyimpangan oknum dalam melaksanakan pendekatan operasional.
3. Karakteristik pengusahaan peternakan yang ada didominasi oleh usaha peternakan rakyat yang bersifat usaha sampingan dengan karakteristik yang belum berorientasi pasar. Karakteristik ini terjadi baik pada pola berbasis lahan maupun tidak.
4. Pola pembibitan ternak yang juga masih diupayakan dengan pola subsisten dimana ini merupakan usaha sampingan dan ini pula menyebabkan perkembangannya juga belum mampu memenuhi tuntutan permintaan akan bakalan atau daging sapi.

Perusahaan swasta belum ada yang berminat untuk mengembangkan usaha pembibitan secara komersil.

5. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan permintaan akan sapi bakalan dan daging di dalam negeri adalah dengan melakukan impor. Sayangnya, impor ini juga memberi dampak negatif bagi keseimbangan harga sapi dan daging di dalam negeri. Pemihakan pada agribisnis sapi potong dalam negeri hendaknya menjadi prioritas dengan tetap melakukan impor dengan terkendali.
6. Pengembangan usaha peternakan sapi potong sudah seharusnya menggunakan pendekatan agribisnis dan kewilayahan. Pendekatan agribisnis harus juga dimulai dari karakter departemen terkait yang juga harus bersifat “agribisnis”. Pendekatan kewilayahan mutlak dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan berbagai sumberdaya pendukungnya. Pendekatan kewilayahan adalah supaya pemerintah bisa fokus dalam melakukan pemberdayaan usaha peternakan sapi potong.

Saran-saran

Saran yang diberikan ini merupakan implikasi dari uraian dan kesimpulan di atas berupa kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Perlunya mengubah lingkungan strategis usaha pengembangan sapi potong dengan memanfaatkan sinyal pasar sebagai pemandu pengembangan. Dengan demikian maka setiap kebijakan dan program diarahkan pada pendekatan agribisnis dan agroindustri. Langkah-langkah operasional hendaknya merupakan terjemahan dari sinyal pasar yang dimaksud. Pemerintah melakukan fasilitasi terhadap infrastruktur pasar hewan, RPH dan seperangkat peraturan yang mendukung.
2. Karakteristik usaha peternakan rakyat yang ada hendaknya dioptimalkan dan pemerintah melakukan terobosan bagi perusahaan swasta untuk bergerak di bidang peternakan sapi potong sekaligus mendorong peternakan rakyat untuk bermitra secara strategis. Upaya ini harus ditunjang dengan deregulasi demi terciptanya iklim usaha ternak sapi potong yang kondusif. Selain itu, pemerintah hendaknya melakukan perkuatan akses permodalan bagi peternakan rakyat dan perusahaan swasta.
3. Pembibitan ternak yang telah berlangsung dilakukan oleh peternak rakyat harus diperkuat dengan berbagai kemudahan akses terhadap teknis reproduksi, permodalan dan pelayanan lain yang mendukung berlangsungnya usaha pembibitan secara kontinyu. Penyediaan bibit unggul baik berupa semen maupun ternak hidup harus

- difasilitasi oleh pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah harus melakukan terobosan agar pihak swasta mau bergerak di bidang pembibitan secara komersil.
4. Kebijakan impor hendaknya dilakukan dalam semangat pemberdayaan agribisnis sapi potong dalam negeri. Untuk itu, impor sapi bakalan dilakukan secara terkendali seiring dengan mendorong agribisnis sapi potong dalam negeri menjadi tangguh berupa peningkatan produktivitas dan populasi ternak sapi.
 5. Sinkronisasi antar wilayah/daerah harus dilakukan sehingga pengembangan agribisnis sapi potong berbasis kewilayahan dapat tertata dan berlangsung dengan semestinya. Pemerintah harus sudah menetapkan wilayah-wilayah yang akan menjadi sentra produksi, pembibitan, pengolahan, dan lain-lain. Sinkronisasi juga dilakukan antara kebijakan pusat dan daerah dalam agribisnis sapi potong. Selain itu sinkronisasi juga dapat dilakukan terhadap komoditas pertanian lainnya, yaitu dengan memanfaatkan sistem integrasi bagi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong.

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2003. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor 2002 Vol 2. Jakarta: BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Berita Resmi Statistik No 14/VII/16 Februari 2004: Sebaran Rumah Tengga Pertanian dan Rumah Tangga Petani Gurem menurut Propinsi di Indonesia. Jakarta: BPS.
- [Kompas] Kompas. 2005. Pedagang sapi lokal keluhkan daging impor. Jakarta: Kompas, Jumat 06 Mei 2005.
- Anonim. 2004. Analisa Program kecukupan Daging 2005. Laporan seminar program kecukupan daging. Jakarta: Ditjennak.
- Anonim. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Sapi. Jakarta: Deptan.
- Aziz MA. 1993. Strategi Operasional Pengembangan Agroindustri Sapi Potong. Dalam Prosiding Agroindustri Sapi Potong. Jakarta: CIDES.
- Delgado C, Rosegrant M, Steinfeld H, Ehmi S and Courbois C. 1999. Livestock to 2020: The next revolution. Washington – Rome – Nairobi: IFPRI – FAO – ILRI.
- Ditjen Bea Cukai. 2005. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari Ditjen Bea Cukai, 2005. Jakarta: Ditjen Bea dan Cukai.
- Ditjen Bina Produksi Peternakan. 2001. Statistik Peternakan tahun 2001. Jakarta: Ditjen Bina Produksi Peternakan.
- Ditjen Bina Produksi Peternakan. 2004. Statistik Peternakan tahun 2004. Jakarta: Ditjen Bina Produksi Peternakan.
- Hadi PU dan Ilham N. 2002. Problem dan Prospek Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian 21 (4), 2002.
- Hadi PU, Ilham N, Thahar A, Winarso B, Vincent D and Quirke D. 2002. Improving Indonesia's Beef Industry. ACIAR Monograph No 35, vi + 128 p. <http://www.deptan.go.id>, diakses 12 Agustus 2006
- Ilham N, Wiryono B, Kariyasa IK, Kirom MNA dan Sri Hastuti. 2001. Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Peternakan Unggulan. Laporan Hasil

- Penelitian. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Rahmanto B. 2004. Analisis Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat. Icaserd working paper no 59. Jakarta: Balitbangtan, Deptan.
- Saragih B. 2000. Agribisnis Berbasis Peternakan. Bogor: USESE dan Pusat Studi Pembangunan IPB.
- Soedjana TD. 1997. Penawaran, Permintaan dan Konsumsi Produk Peternakan. Laporan Hasil Penelitian. Bogor – Jakarta: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Deptan.
- Yusdja Y dan Ilham N. 2004. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong. AKP. Volume 2 No 2, Juni 2004: 184 – 203.